

**ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG
KETIDAKHARUSAN IZIN DARI WALI BAGI ORANG *SAFIH* YANG
MELAKUKAN AKAD NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

AHMAD MUKHOLIL
NIM: 032111171

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Ahmad Mukholil

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Mukholil

Nomor Induk : 032111171

Jurusan : AS

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH
TENTANG KETIDAKHARUSAN IZIN
DARI WALI BAGI ORANG *SAFIH* YANG
MELAKUKAN AKAD NIKAH**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Mei 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs.H. Slamet Hambali
NIP. 150 198 821

Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 150 289 379

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Ahmad Mukholil
NIM : 032111171
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH
TENTANG KETIDAKHARUSAN IZIN DARI WALI
BAGI ORANG *SAFIH* YANG MELAKUKAN AKAD
NIKAH**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

17 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2008/2009

Ketua Sidang,

Semarang, Juli 2009
Sekretaris Sidang,

Hj. Rr. Sugiharti, SH, MH
NIP. 150 104 180

Drs.H. Slamet Hambali
NIP. 150 198 821

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H.A. Ghozali, M.Si
NIP. 150 261 992

Drs. H. A. Noer Ali
NIP. 150 177 474

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs.H. Slamet Hambali
NIP. 150 198 821

Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 150 289 379

MOTTO

Artinya : Kalau kamu menthalak perempuan lantas sampai iddahnya, maka janganlah kamu (yang jadi wali) mencegah mereka menikah dengan laki-laki itu, apabila mereka sudah suka sama suka dengan cara yang sopan. (Q. S. Al-Baqarah, 232).*

* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 56.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tersayang (Bapak Wardan dan Ibu Salimah)** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Kakak dan Adikku Tercinta (Abdussomad dan Mbak Nur Kholifah, Mas Al-Musafi', dan Mbak Rikhaniyah)** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2003 Fak Syariah** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku

Semarang, 14 Mei 2009

AHMAD MUKHOLIL
NIM: 032111171

ABSTRAK

Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang ketidakharusan izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah? Bagaimana metode *istinbat* hukum Ibnu Qudamah tentang ketidakharusan izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data Primer, yaitu Kitab *al-Mughni*. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, sedangkan metode analisisnya adalah metode deskriptif yang diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat dan metode *istinbat* hukum pendapat Ibnu Qudamah tentang tidak harus izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Menurut Ibnu Qudamah, akad nikah yang dilakukan orang *safih* (*dungu*) adalah sah, baik dia memperoleh izin dari walinya atau tidak, hal ini sebagaimana ia tegaskan bahwa hukumnya anak kecil dan orang gila sama seperti hukumnya orang *safih* (*dungu/idiot*), sang wali boleh memberi ijin kepadanya dalam sebagian perbuatan sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sah dan lulus di antaranya ialah nikah, maka bilamana wali mengijinkan dia untuk menikah kemudian dia melaksanakan sendiri maka perbuatannya itu sah. Jikalau seorang *safih* menikah tanpa mendapat ijin dari walinya maka nikahnya itu sah, kemudian apabila *safih* ingin nikah untuk jangka waktu tertentu yaitu yang lamanya bergantung pada permufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya) maka dia boleh melakukannya meskipun tidak diijinkan walinya. Sama juga dia telah meminta kepada walinya yang kemudian ditolak maupun tidak ditolak. Namun nikahnya tidak sah kecuali dengan mahar misil. Dalam perspektif Ibnu Qudamah bahwa ketidakharusan izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah adalah karena orang *safih* diqiyaskan dengan laki-laki pada umumnya yang tidak perlu wali. Selain itu pernikahan tidak menyangkut harta benda melainkan masalah kodrat biologis. Atas dasar itu pernikahan orang *safih* dianggap sah meskipun tidak ada izin dari wali. Dengan demikian *istinbat* yang dipakai Ibnu Qudamah adalah *qiyas*.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG KETIDAKHARUSAN IZIN DARI WALI BAGI ORANG SAFIH YANG MELAKUKAN AKAD NIKAH”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Slamet Hambali selaku Dosen Pembimbing I dan Ali Murtadho, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG POSISI WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya	16
B. Syarat dan Rukun Nikah	30
C. Wali dalam Nikah	38
1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya	38
2. Macam-Macam Wali	43
3. Kedudukan dan Kewenangan Wali dalam Pernikahan	46

BAB III : PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG

KETIDAKHARUSAN IZIN DARI WALI BAGI ORANG

SAFIH YANG MELAKUKAN AKAD NIKAH

A. Biografi Ibnu Qudamah, dan Karya-Karyanya	49
1. Latar Belakang Ibnu Qudamah	49
2. Karya-Karyanya	51
B. Pendapat Ibnu Qudamah tentang Ketidakharusan Izin dari Wali bagi Orang <i>Safih</i> yang Melakukan Akad Nikah	54

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG

KETIDAKHARUSAN IZIN DARI WALI BAGI ORANG SAFIH

YANG MELAKUKAN AKAD NIKAH

A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Ketidakharusan Izin Dari Wali Bagi Orang <i>Safih</i> yang Melakukan Akad Nikah...	66
B. Analisis Metode <i>Istinbat</i> Hukum Ibnu Qudamah tentang Ketidakharusan Izin dari Wali bagi Orang <i>Safih</i> yang Melakukan Akad Nikah	77

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	88
C. Penutup	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan wanita. Pria dan wanita diciptakan dengan disertai kebutuhan biologis.

Dalam memenuhi kebutuhan biologis ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi dan bila dilanggar mempunyai sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Sanksi yang dimaksud yaitu manakala pria dan wanita dalam memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa diikat oleh suatu tali pernikahan.

Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits.

Menurut Sayuti Thalib pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹ Sementara Mahmud Yunus menegaskan, pernikahan ialah akad antara calon laki istri

¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47.

untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.² Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.³ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.⁴

As Shan'ani dalam kitabnya "*Subul al-Salam*" memaparkan bahwa *al-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata "nikah" itu dalam pengertian "persetubuhan" dan "akad". Ada orang yang mengatakan "nikah" ini kata majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa "nikah" adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata "nikah" itu *musytarak* bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar'i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur'an kecuali dalam hal akad.⁵

²Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1.

³Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1.

⁴Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa*, terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002, hlm. 375.

⁵ Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhyat al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 350.

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Dalam konteks ini Rasulullah bersabda:

: , : , :
 " ,
 : ,
 , ,
 6. () . "

Artinya : Dari Anas : sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi SAW sebagian dari mereka ada yang mengatakan: "aku tidak akan menikah". Sebagian dari mereka lagi mengatakan: "aku akan selalu shalat dan tidak tidur". Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: "aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka". Ketika hal itu di dengar oleh Nabi SAW beliau bersabda: apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu? Padahal di samping berpuasa aku juga berbuka. Di samping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. (Muttafaq A'laih)

Dari hadits di atas mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menyukai seseorang yang berprinsip anti menikah. Karena itu menikah merupakan bagian dari sunnah Rasul, dan salah satu rukun dari nikah yaitu adanya wali.

⁶Imam Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz 4, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tt, hlm. 171.

Dalam hubungannya dengan wali, bahwa dalam prakteknya tidak sedikit adanya hubungan muda-mudi yang tidak direstui orang tuanya sehingga mengambil jalan pintas dengan cara menikah tanpa wali. Dalam kaitan ini ada hadits yang menegaskan sebagai berikut :

".
:
7()".

Artinya : Bersumber dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda : tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang wali (HR Ahmad dan Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa'i)

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa adanya wali merupakan bagian yang mutlak untuk sahnya pernikahan. Karena itu kedudukan wali merupakan salah satu rukun akad nikah. Tanpa adanya wali maka pernikahan itu menjadi batal. Akan tetapi kenyataan menunjukkan masih adanya keberanian muda-mudi melakukan nikah tanpa wali dan hal itu bukan tidak berdasar, melainkan karena adanya sebagian ulama yang membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Salah seorang ulama di Indonesia Ahmad Hassan dalam bukunya *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* menegaskan:

Keterangan-keterangan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.⁸

⁷*Ibid.*, hlm. 193.

⁸Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Jilid 1-2, Bandung: Cet. 12, CV Diponegoro, 2003, hlm. 244-263.

Sehubungan dengan keterangan tersebut, *Fiqih Tujuh Madzhab* yang dikarang oleh Mahmud Syalthut menguraikan bahwa nikah tanpa wali terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.⁹

Dalam *Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan:

'

¹⁰.

, ,

Artinya: Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah, Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali adalah dengan mengemukakan alasan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

⁹Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 121.

¹⁰Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, Al-Faqih, *Bidayat al-Mujtahid Wa nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, juz 2, 1409H/1989M, hlm. 6.

...

(234:)

Artinya: "Kemudian apabila telah habis masa *iddah*nya, maka tiada dosa bagimu (para Wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka" (Q.S. Al-Baqarah: 234).¹¹

Dalam hubungannya seorang *safih* yang menikah tanpa izin dari wali, maka Imam Syafi'i dan Imamiyah menyatakan bahwa seorang *safih* yang hendak menikah harus memperoleh izin dari wali, jika tidak mendapat izin maka nikahnya tidak sah. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah bahwa akad-nikah yang dilakukan orang *safih* (dungu) adalah sah, baik dia memperoleh izin dari walinya atau tidak.¹² Hal ini sebagaimana ia katakan:

,

.

Artinya: hukumnya anak kecil dan orang gila sama seperti hukumnya orang *safih* (dungu/idiot, sang wali boleh memberi ijin kepadanya dalam sebagian perbuatan sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sah dan lulus diantaranya ialah nikah,

¹¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1978, hlm 57.

¹²Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 317.

¹³Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, Juz 11, Kairo: Daar al-Manar, 1367, hlm. 235.

maka bilamana wali mengizinkan dia untuk menikah kemudian dia melaksanakan sendiri maka perbuatannya itu sah. Jikalau seorang safih menikah tanpa mendapat ijin dari walinya maka nikahnya itu sah, kemudian apabila safih ingin menikah untuk mendapatkan kesenangan atau pelayanan maka dia boleh melakukannya meskipun tidak diijinkan walinya. Sama juga dia telah meminta kepada walinya yang kemudian ditolak maupun tidak ditolak. Namun nikahnya tidak sah kecuali dengan mahar misil.

Sisi menariknya judul ini adalah karena dalam perspektif Ibnu Qudamah bahwa akad-nikah yang dilakukan orang *safih* (dungu) adalah sah, baik dia memperoleh izin dari walinya atau tidak.

Berdasarkan keterangan tersebut mendorong peneliti memilih tema ini dengan judul: ***ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG KETIDAKHARUSAN IZIN DARI WALI BAGI ORANG SAFIH YANG MELAKUKAN AKAD NIKAH***

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang ketidakharusan izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Ibnu Qudamah tentang ketidakharusan izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah tentang ketidakharusan izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah.
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Ibnu Qudamah tentang ketidakharusan izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah.

D. Telaah Pustaka

Sampai dengan disusunnya skripsi ini, penulis belum menjumpai penelitian yang temanya sama dengan penelitian yang hendak disusun, namun ditemukan satu skripsi yang temanya tentang wali, yaitu skripsi yang disusun oleh Rosalin (Tahun 2005) dengan judul: *Analisis Pendapat Ahmad Hassan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*.¹⁴ Dalam kesimpulannya diutarakan bahwa salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan membolehkan gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sah dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu. Demikian pendapat A.Hassan.

¹⁴Rosalin, *Analisis Pendapat Ahmad Hassan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*, (Skripsi, Untuk meraih Sarjana Hukum Islam: tidak dipublikasikan), Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005.

Di dalam mempertahankan pendapatnya itu, Ahmad Hassan menggunakan surat al-Baqarah ayat 232 dan hadits dari Abu Hurairah. Setelah diadakan analisis terhadap ayat yang dipergunakan Ahmad Hassan ternyata penafsirannya keliru. Selanjutnya tentang hadits yang dipergunakan sebagai dasar diperbolehkannya nikah tanpa wali, maka di sini pun Ahmad Hassan keliru, karena hadits itu menunjuk bahwa wanita gadis menikah harus memakai wali.

Skripsi yang disusun oleh Kirmanto (Tahun 2006) dengan judul: *Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Akibat Hukum Nikah Tanpa Wali*. Dalam kesimpulannya diutarakan bahwa menurut Imam al-Syafi'i, pernikahan tanpa wali maka pernikahan demikian batal, karena pernikahan harus ada izin dari walinya. Alasan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa seperti ini didasarkan pada *istinbat* hukum berupa al-Qur'an, yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232, surat an-Nisa ayat 34, surat an-Nisa ayat 25, dan hadis dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa, r.a. yang diriwayatkan oleh Abu Daud At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh Ibnul Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban

Pendapat Imam al-Syafi'i yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan sebelum nikah karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita

menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antara ayah dengan anak-anaknya. Problem madaratnya sudah bisa dibayangkan. Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangat diperlukan. Kontekstualisasi pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan dalam hukum perkawinan kontemporer. Sangat tepat kalau peristiwa pernikahan itu memerlukan wali dan melibatkan keluarga, terutama wali. Berbeda dengan masyarakat Barat yang sudah "modern", peristiwa pernikahan relatif hanya melibatkan mereka yang menikah saja. Jadi, lebih bersifat individual. Dalam masyarakat adat atau masyarakat yang bersifat kekeluargaan atau masyarakat yang hubungan kekeluargaannya masih kuat, keberadaan wali masih sangat dibutuhkan. Menafikan keluarga dalam masalah pernikahan bukan saja bertentangan, tetapi juga akan terasa janggal dan tidak lazim dilakukan.

Adapun beberapa kitab atau buku yang mengungkapkan tentang kedudukan wali dalam pernikahan dapat disebutkan di bawah ini :

1. *Fikhus Sunnah* disusun oleh Sayyid Sabiq dalam buku ini dijelaskan panjang lebar tentang masalah pernikahan. Dalam hubungannya dengan wali bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.¹⁵

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fikhus Sunnah*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tt, hlm. 240.

2. *Al-Muwatta'* hasil karya Imam Malik ibn Anas. Kitab ini merupakan kitab fiqh yang pada dasarnya berisi hadits-hadits yang cukup baik untuk dikaji dan direnungi. Dalam kitab tersebut diungkapkan pula masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.¹⁶
3. *Fath al- Mu'in*, disusun oleh Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary. Dalam kitab ini terdapat pula pembahasan tentang pernikahan dan tentang wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan wali mempunyai kedudukan yang penting dalam pernikahan. Karena itu wali menjadi bagian dari rukun pernikahan disamping rukun lainnya seperti ada calon suami, calon isteri, dua orang saksi, dan adanya ijab qabul.¹⁷
4. *Fath al-Qarib* disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi. Kitab ini pun menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan bahwa wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Wali Nikah ialah: "orang laki-laki yang dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan" Adanya Wali Nikah merupakan rukun dalam akad nikah.¹⁸

¹⁶Imam Malik Ibn Annas, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiyah tth, hlm.121.

¹⁷Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-'Uyun*, Semarang: Maktabah wa Matbaah, karya Toha Putera , tth, hlm. 72.

¹⁸Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, tth, hlm. 22.

5. *Fiqih Wanita* hasil karya Ibrahim Muhammad al-Jamal. Dalam buku ini diungkapkan pula beberapa hadits yang menegaskan tidak sahnya nikah jika tanpa wali.¹⁹
6. *Fiqih Tujuh Madzhab* yang dikarang oleh Mahmud Syalthut. Dalam buku itu diungkapkan bahwa nikah tanpa wali terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.²⁰
7. *Hukum-Hukum Fiqih Islam* hasil karya TM Hasbi Ash-Shiddiqie. Dalam buku ini dijelaskan bahwa menurut Imam al-Syafi'i, tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali yang lelaki.²¹

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan tersebut belum mengungkapkan pendapat Ibnu Qudamah tentang tidak harus izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya

¹⁹Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, terj. Ansori umara sitanggal, Semarang: CV Asyfa, 19960, hlm. 34.

²⁰Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 121.

²¹ TM Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001, hlm. 223.

dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²³ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.²⁴ Data yang dimaksud adalah Kitab *al-Mughni*.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²⁵ Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: *I'annah al-Talibin*; *Sahih al-Bukhari*; *Sahih Muslim*; *Fath al-Wahab*; *Bughyatul Musytarsidin*; *al-Muhazzab*; *Tasir Ibnu Kasir*; *Tafsir al-Maragi*, *Tafsir*

²²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

²⁴Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

²⁵*Ibid.*, hlm. 163.

at-Tabari; Tafsir al-Manar; Tafsir Ahkam; Kitab Mazahib al-Arba'ah; Fath al-Qarib; Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid; Kifayah al-Akhyar; Fathul Mu'in; Subulus Salam; Nail al-Autar.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁶ dengan demikian metode ini dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisis masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat dan metode *istinbat* hukum pendapat Ibnu Qudamah tentang tidak harus izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1998, hlm. 206

masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang posisi wali dalam pernikahan yang meliputi pengertian nikah dan dasar hukumnya, syarat dan rukun nikah, wali dalam nikah (pengertian wali dan dasar hukumnya, macam-macam wali, kedudukan dan kewenangan wali dalam pernikahan).

Bab ketiga berisi pendapat Ibnu Qudamah tentang ketidakharusan izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah yang meliputi biografi Ibnu Qudamah dan karya-karyanya (latar belakang Ibnu Qudamah, karya-karyanya), pendapat Ibnu Qudamah tentang ketidakharusan izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah.

Bab keempat berisi analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang ketidakharusan izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah yang meliputi analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang ketidakharusan izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah, analisis metode *istinbat* hukum Ibnu Qudamah tentang ketidakharusan izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POSISI WALI

DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.¹ Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²

Berdasarkan hal itu, pada tempatnya apabila Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti dan rinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Khaliq (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Pernikahan dilaksanakan atas dasar

¹Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1.

kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum nikah dan ijab-kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (*walimah*). Hak dan kewajiban suami istri timbal-balik diatur amat rapi dan tertib; demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul.³

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج- الزواج- الزيجه). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al- wath'u* (الوطاء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al- wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ- يطأ- وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli

³*Ibid.*, hlm. 1-2.

dan bersetubuh atau bersenggama.⁴ *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu – dhamman* (ضم- يضم- ضما) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan, juga berarti bersikap lunak dan ramah.⁵

Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u - jam'an* (جمع- يجمع- جمعا) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.⁶

Sebutan lain buat pernikahan ialah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* (زاج- يزوج- زوجا) yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di sini ialah *at-tazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwaja- yuzawwiju- tazwijan* (زوّج- فعل- يفعل) dalam bentuk timbangan "*fa'ala-yufa'ilu- tafilan*" (تزوج- تفعيلا) yang secara harfiah berarti menikahkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.⁷

⁴Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42-43

⁶*Ibid*, hlm. 43.

⁷*Ibid*, hlm. 43-44.

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan dan tentang wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.⁸

Kitab *Fath al-Qarib* yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, wati, jimak dan akad dan diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁹

Menurut Zakiah Daradjat, pernikahan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹⁰ Menurut Zahry Hamid, yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah: "Akad (*ijab qabul*) antara wali colon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya."¹¹

Dari segi pengertian ini maka jika dikatakan: "Si A belum pernah nikah", artinya bahwa si A belum pernah mengkabulkan untuk dirinya

⁸Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 72.

⁹Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, tth, hlm. 48.

¹⁰Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 38.

¹¹Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1. Beberapa definisi pernikahan dapat dilihat pula dalam Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 1-4.

terhadap ijab akad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika dikatakan: "Anak itu lahir diluar nikah", artinya bahwa anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak berada dalam atau terikat oleh ikatan pernikahan berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum.

Menurut Hukum Islam, pernikahan ialah: "Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari'at Islam".¹²

Dalam Pasal 1 Bab I Undang-undang No. : 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹³

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hukum pernikahan merupakan bahagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal pernikahan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, bagaimana cara menyelenggarakan akad pernikahan menurut hukum, bagaimana cara

¹²*Ibid.*

¹³Muhammad Amin Suma, *op. cit*, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan *miitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.

memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad nikah sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan pernikahan, serta akibat yuridis dari berakhirnya pernikahan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan isteri, anak-anak mereka dan harta mereka. Istilah yang lazim dikenal di kalangan para ahli hukum Islam atau Fuqaha ialah Fiqih Munakahat atau Hukum Pernikahan Islam.

Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah memperhatikan intisari dari sabda Rasulullah SAW. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya. Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad pernikahan hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan pernikahan. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut:

- a. Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW., karena hidup beristeri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk Sunnah beliau.
- b. Memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.

- c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spiritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spiritual dan phisik materiil yang diridloi Allah Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin di bawah naungan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.¹⁴

Adapun dasar hukum melaksanakan akad nikah sebagai berikut:

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

- 1) Firman Allah ayat 3 (An-Nisa'):

(3 :) . . .

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja (Q.S.An-Nisa': 3).¹⁵

¹⁴Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 2.

¹⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 115.

2) Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):

(32 :)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32).¹⁶

3) Firman Allah ayat 21 Surah 30 (Ar-Rum):

(21 :)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).¹⁷

Beberapa hadis yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

: — —
".
.

¹⁶*Ibid*, hlm. 549.

¹⁷*Ibid*, hlm. 644.

18 . "

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).

" :

) "

19 (

Artinya: Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri". (HR. Al Bukhari dan Muslim).

: , : , :

" :

20 () . "

Artinya: Dari Anas: "Sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi saw. sebagian dari mereka ada yang mengatakan: "Aku tidak akan menikah". Sebagian dari mereka lagi mengatakan: "Aku akan selalu bersembahyang dan tidak tidur". Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: "Aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka". Ketika hal itu

¹⁸Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, juz 4, 1973, hlm. 171.

¹⁹*Ibid*, hlm. 171

²⁰*Ibid*, hlm. 171

didengar oleh Nabi saw. beliau bersabda: "Apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu?. Padahal disamping berpuasa aku juga berbuka. Disamping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari (golongan) ku".(HR. Al Bukhari dan Muslim).

: : :

). : ,

²¹ (

Artinya: Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya". (HR. Ahmad dan Al-Bukhari).

" :

) : , "

) .(38 :) (

²² .(

Artinya: dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa isteri dan anak cucu". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menurut At Tirmidzi, hadits Samurah tersebut adalah hadits Hasan yang gharib (aneh). Al Asy'ats bin Abdul Mulk meriwayatkan hadis ini dari

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*. Lihat juga TM.Hasbi ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, jilid 8, 2001, hlm. 3-8. TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, jilid 5, Semarang; PT.Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm. 3-8

Hasan dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah dan ia dari Nabi saw. Dikatakan bahwa kedua hadits tersebut adalah shahih.

Hadis senada diketengahkan oleh Ad Darimi dalam Musnad Al Firdaus dari Ibnu Umar, dia mengatakan: "Rasulullah saw. bersabda: "Berhajilah nanti kamu akan kaya. Bepergianlah nanti kamu akan sehat, dan menikahlah nanti kamu akan banyak. Sesungguhnya aku akan dapat membanggakan kamu dihadapan umat-umat lain". Dalam isnad hadits tersebut terdapat nama Muhammad bin Al Harits dari Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamni, keduanya adalah perawi yang sama-sama lemah.

Hadis senada juga diketengahkan oleh Al Baihaqi dari Abu Umamah dengan redaksi: "Menikahlah kamu, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian dihadapan ummat-ummat lain, dan janganlah kalian seperti para pendeta kaum Nasrani". Namun dalam sanadnya terdapat nama-nama Muhammad bin Tsabit, seorang perawi yang lemah.

Hadis senada lagi diriwayatkan oleh Daraquthni dalam Al Mu'talaf dari Harmalah bin Nu'man dengan redaksi: "Wanita yang produktif anak itu lebih disukai oleh Allah ketimbang wanita cantik namun tidak beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan ummat-ummat lain pada hari kiamat kelak". Namun menurut Al Hafiz Ibnu Hajar, sanad hadits ini lemah.

Para Fukaha berbeda pendapat tentang status hukum asal dari pernikahan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan

Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab zahiry dan Ibn. Hazm hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.²³ Adapun Hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan di antara para ulama, bahwa hukumnya ada beberapa macam, yaitu:²⁴

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan nikah, maka bagi orang itu melakukan pernikahan hukumnya wajib. Qa'idah fiqhiyah mengatakan, "Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib"; atau dengan kata lain, "Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya." Penerapan kaidah tersebut dalam masalah pernikahan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan, baginya pernikahan itu wajib hukumnya.

Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan

²³Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 3-4.

²⁴Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 14-16

memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak nikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan pernikahan di atas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi itu, hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Ulama madzhab al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Ulama-ulama madzhab zahiri berpendapat bahwa pernikahan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak nikah.²⁵

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan sehingga apabila nikah juga akan berakibat menyusahkan isterinya. Hadis Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.

Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)* berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar untuk isterinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak isteri, tidak halal menikahi seseorang kecuali apabila ia menjelaskan keadaannya itu kepada calon isteri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak isterinya, barulah ia boleh melakukan pernikahan. Lebih lanjut Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami'*

²⁵*Ibid*, hlm. 14.

li Ahkam al-Qur'an mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon isteri harus memberi keterangan kepada calon isteri agar pihak isteri tidak akan merasa tertipu. Apa yang dikatakan Al-Qurthubi itu amat penting artinya bagi sukses atau gagalnya hidup pernikahan. Dalam bentuk apa pun, penipuan itu harus dihindari. Bukan saja cacat atau penyakit yang dialami calon suami, tetapi juga nasab keturunan, kekayaan, kedudukan, dan pekerjaan jangan sampai tidak dijelaskan agar tidak berakibat pihak istri merasa tertipu.²⁶

Hal yang disebutkan mengenai calon suami itu berlaku juga bagi calon istri. Calon isteri yang tahu bahwa ia tidak akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap suami, karena adanya kelainan atau penyakit, harus memberikan keterangan kepada calon suami agar jangan sampai terjadi pihak suami merasa tertipu. Bila ia mencoba menutupi cacat yang ada pada dirinya, maka suatu hari masalah ini akan berkembang dengan pertengkaran dan penyesalan.

Bahkan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada diri calon isteri, yang apabila diketahui oleh pihak calon suami, mungkin akan mempengaruhi maksudnya untuk menikahi, misalnya giginya palsu sepenuhnya, rambutnya habis yang tidak mungkin akan tumbuh lagi hingga terpaksa memakai rambut palsu atau wig dan sebagainya, harus dijelaskan kepada calon suami untuk menghindari jangan sampai akhirnya pihak suami merasa tertipu.

²⁶Sikap terus terang antara calon suami isteri sangat penting karena untuk membangun sikap jujur yang justru harus dimulai pada saat saling mengenal. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari sekap menyesal.

Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap isterinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon isteri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk nikah.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu pernikahan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh dari pada yang telah disebutkan di atas.²⁷

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak nikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata nikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.²⁸

B. Syarat dan Rukun Nikah

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 16

²⁸ *Ibid*, hlm. 16.

adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"²⁹ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."³⁰ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,³¹ melazimkan sesuatu.³²

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.³³ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,³⁴ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.³⁵ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

³⁰*Ibid.*, hlm. 1114.

³¹Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

³²Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

³³Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

³⁴Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

³⁵Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.³⁶

Adapun syarat dan rukun nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.³⁷

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut syariat Islam, Suatu akad nikah dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'.

Rukun akad nikah ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.

³⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

³⁷Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 80

- g. Tidak dipaksa.
- h. Bukan *mahram* calon isteri.

2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
- b. Jelas ia perempuan.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
- f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
- g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
- h. Bukan *mahram* calon suami.³⁸

3. Wali. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila).
- e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
- g. Tidak dipaksa.
- h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
- i. Tidak fasiq.

³⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila),:
- e. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
- f. Tidak fasiq.
- g. Tidak pelupa.
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.³⁹

5. *Ijab* dan *Qabul*.

Ijab akad nikah ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah calon suami atau wakilnya".

Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.

³⁹Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71.

- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad nikah ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya."⁴⁰

Syarat-syarat *Qabul* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "*tazwij*" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.⁴¹

⁴⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 65.

⁴¹Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.34-40.

- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- f. Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.⁴²
- h. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.
- i. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Contoh *ijab qabul* akad nikah

- 1). Wali meng*ijabkan* dan calon mempelai laki-laki meng-*qabulkan*.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fatimah binti bimahri alfi rubiyatin halan*".
 Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihalan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan maskawin tersebut secara tunai".⁴³
- 2). Wali mewakilkan *ijabnya* dan calon mempelai laki-laki meng-*qabulkan*.

⁴²Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 25.

⁴³Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 59.

- a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fathimah binta Muhammadin muwakili bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".⁴⁴
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
- 3). Wali meng*ijabkan* dan calon mempelai laki-laki mewakilkan kabulnya.
- a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimah binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin halan*", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai"⁴⁵
- 4). Wali mewakilkan *Ijabnya* dan mempelai laki-laki mewakilkan *Qabulnya*.
- a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimah binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan anak perempuan Muhammad

⁴⁴Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 26.

⁴⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 66.

yang telah mewakilkan kepada saya, dengan Ali yang telah mewakilkan kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

- b. *Qabul: "Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin halan"*. Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".⁴⁶

C. Wali dalam Nikah

1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya

Perwalian, dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayah* (*al-wilayah*), seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) seperti dalam penggalan ayat *waman yatwallallahu wa-rasulahu* dan kata-kata *ba'dhuhum awliya'u ba'dhin*. Ayat 61 surat at-Taubat (9); juga berarti kekuasaan/otoritas (*as-sulthah wal-qudrah*) seperti dalam ungkapan *al-wali* (الوالى) yakni orang yang mempunyai kekuasaan". Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah "*tawalliy al-amr*" (mengurus/menguasai sesuatu).⁴⁷

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Abdurrrahman al-

⁴⁶ Achmad Kuzari, *op. cit*, hlm. 40.

⁴⁷ Muhammad Amin Suma, *op. cit*, hlm. 134

Jaziri, wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya.⁴⁸ Sejalan dengan itu menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.⁴⁹

Orang yang mengurus/menguasai sesuatu (akad/transaksi), disebut wali seperti dalam penggalan ayat: *fal-yumlil waliyyuhu bil-'adli*. Kata *al-waliyy* muannatsnya *al-waliyyah* (الولية) dan jamaknya *al-awliya* (الاولياء) (ولى-ولى-وليا), berasal dari kata *wala-yali-walyan-wa-walayatan* (ولّى-ولّى-ولّى-ولّى), secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.

Atas dasar pengertian semantik kata wali di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqih.

⁴⁸Abdurrrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 22.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hlm. 69.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan-nafsi waf-mali ma'an*).⁵⁰

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrاف*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta- kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.⁵¹

Wali Nikah ialah: "orang laki-laki yang dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan pernikahan calon perempuan" Adanya Wali Nikah merupakan rukun dalam akad nikah.

⁵⁰Muhammad Amin Suma, *op. cit*, hlm.134-135

⁵¹ *Ibid*, hlm. 135-136.

Jumhur Ulama mensyaratkan adanya Wali Nikah dalam akad nikah dan wanita tidak boleh menikahi dirinya sendiri. Menurut Ibnu Mundzir tidak terdapat seorang sahabat pun yang menyalahi pendapat Jumhur ini. Imam Malik berpendapat bahwa disyaratkan adanya Wali Nikah bagi wanita bangsawan dan tidak disyaratkan bagi wanita biasa.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya Wali Nikah dalam suatu akad pernikahan. Ulama Dhahiriyah mensyaratkan adanya Wali Nikah bagi gadis dan tidak mensyaratkan bagi janda. Abu Tsaur berkata bahwa wanita boleh menikahkan dirinya dengan izin walinya.

Adapun dasar hukum wali sebagai berikut:

(232 :)

Artinya : Kalau kamu menthalak perempuan lantas sampai iddahnya, maka janganlah kamu (yang jadi wali) mencegah mereka menikah dengan laki-laki itu, apabila mereka sudah suka sama suka dengan cara yang sopan. (Q. S. Al-Baqarah, 232).⁵²

:

,). :

⁵³(

Artinya: Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa, r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. Diriwayatkan oleh

⁵²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 56.

⁵³Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, juz 3, (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), hlm. 117

Imam Ahmad. dan Arba'ah (Abu Daud At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh Ibnul Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, tetapi beliau menilainya cacat karena mursal.

Sabda Nabi s.a.w:

:

,

,

).

⁵⁴(

Artinya : Dari Aisyah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. bersabda: Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya. Diriwayatkan oleh Al Arba'ah selain An-Nasa'i. (berarti hanya Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan dinilai shahih oleh: Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Diriwayatkan:

:

).

,

:

⁵⁵(

Artinya : Dari Abu Hurairah ra berkata: bersabda Rasulullah saw. „wanita tidak boleh menikahkan wanita dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya (H.R. Ibnu Majah dan Daraquthni, dan para perawinya orang-orang terpercaya).

⁵⁴*Ibid*, hlm. 117 – 118

⁵⁵*Ibid*, hlm. 119 – 120.

2. Macam-Macam Wali

Dalam Hukum Pernikahan Islam dikenal adanya empat macam Wali Nikah, yaitu:

1. Wali Nasab, yaitu Wali Nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan.
2. Wali Mu'tiq, yaitu Wali Nikah karena, memerdekakan, artinya seorang ditunjuk menjadi wali nikahnya seorang perempuan, karena orang tersebut pernah memerdekakannya. Untuk jenis kedua ini di Indonesia tidak terjadi.
3. Wali Hakim, yaitu Wali Nikah yang dilakukan oleh Penguasa, bagi seorang perempuan yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena telah meninggal dunia, menolak menjadi wali nikah atau sebab-sebab lain. .
4. Wali Muhakkam, yaitu Wali Nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk menikahkan mereka, dikarenakan tidak ada Wali Nasab, Wali Mu'tiq, dan Wali Hakim. Untuk jenis terakhir ini di Indonesia sedikit sekali kemungkinan terjadinya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka yang lazim di Indonesia hanyalah Wali Nasab dan Wali Hakim saja.

Urutan Wali Nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah.
2. Kakek (Bapak ayah).
3. Ayah Kakek (ayah tingkat tiga) dan seterusnya ke atas.

4. Saudara laki-laki sekandung.
5. Saudara laki-laki seayah.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
7. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
8. Paman sekandung (Saudara laki-laki ayah sekandung).
9. Paman seayah (Saudara laki-laki ayah seayah)
10. Anak laki-laki paman sekandung.
11. Anak laki-laki paman seayah.
12. Saudara kakek sekandung (Bapak ayah sekandung).
13. Saudara kakek seayah (Bapak ayah seayah).
14. Anak laki-laki saudara kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara kakek seayah.⁵⁶

Hak menjadi Wali Nikah terhadap perempuan adalah sedemikian berurutan, sehingga jika masih terdapat Wali Nikah yang lebih dekat maka tidak dibenarkan Wali Nikah yang lebih jauh itu menikahkannya, jika masih terdapat Wali Nasab maka Wali Hakim tidak berhak menjadi Wali Nikah.

Dalam urutan Wali Nasab, Wali Nikah yang lebih dekat disebut Wali Aqrab, sedang yang lebih jauh disebut Wali Ab'ad, misalnya ayah dan kakek, ayah disebut Wali Aqrab sedang kakek disebut Wali Ab'ad. Demikian pula antara kakek dan ayah kakek, antara ayah kakek dan

⁵⁶Zahri Hamid, *op. cit.*, hlm. 29-31.

saudara laki-laki sekandung, antara saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah dan seterusnya.

Hak Wali Nikah dari Wali Aqrab berpindah kepada Wali Ab'ad apabila:

1. Wali Aqrab tidak beragama Islam sedang mempelai perempuan beragama Islam.
2. Wali Aqrab orang yang fasiq.
3. Wali Aqrab belum baligh.
4. Wali Aqrab tidak berakal (gila atau majnun).
5. Wali Aqrab rusak ingatannya sebab terlalu tua atau sebab lain.

Hak Wali Nikah dari Wali Nasab berpindah kepada Wali Hakim apabila:

1. Tidak ada Wali Nasab sama sekali.
2. Wali mafqud (dinyatakan hilang tidak diketahui tempatnya).
3. Walinya sendiri menjadi mempelai laki-laki, padahal tidak ada wali nikah yang sederajat dengannya. .
4. Walinya sakit pitam (ayan Jw.). .
5. Walinya jauh dari tempat akad pernikahan (ghaib).
6. Walinya berada di penjara yang tidak boleh ditemui.
7. Walinya berada di bawah pengampunan (mahjur alaih).
8. Walinya bersembunyi (tawari).
9. Walinya jual mahal (sombong atau ta'azzuz).
10. Walinya menolak atau membangkang menjadi wali Nikah ('adlal).

11. Walinya sedang berihram haji atau umrah.

3. Kedudukan dan Kewenangan Wali dalam Pernikahan

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan panjang lebar tentang masalah pernikahan. Dalam hubungannya dengan wali bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.⁵⁷ Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.⁵⁸

Fiqh *Tujuh Madzhab* yang dikarang oleh Mahmud Syalthut. Dalam buku itu diungkapkan bahwa nikah tanpa wali terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.⁵⁹

Dalam *Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan:

⁵⁷Sayyid Sabiq, *Fihkus Sunnah*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tt, hlm. 240.

⁵⁸Imam Malik Ibn Annas, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiyah tt, hlm.121.

⁵⁹Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 121.

60

Artinya: Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh.

Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali adalah dengan mengemukakan alasan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

...

(234:)

Artinya: "Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para Wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka" (Q.S. Al-Baqarah: 234).⁶¹

Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Berdasarkan riwayat Ibnul Qasim dari Malik dapat disimpulkan adanya pendapat lain, yaitu bahwa persyaratan wali itu sunat hukumnya, dan

⁶⁰Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, juz II, 1409H/1989M, hlm. 6.

⁶¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag, 1978), hlm 57.

bukan fardlu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Malik bahwa ia berpendapat adanya waris mewarisi antara suami dengan istri yang pernikahannya terjadi tanpa menggunakan wali, dan wanita yang tidak terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang lelaki untuk menikahkannya. Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahkannya.

Dengan demikian, seolah-olah Malik menganggap wali itu termasuk syarat kelengkapan pernikahan, bukan syarat sahnya pernikahan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Maliki dari Baghdad yang menyatakan bahwa wali itu termasuk syarat sahnya pernikahan, bukan syarat kelengkapan.

Perbedaan pendapat ini menurut Ibnu Rusyd disebabkan tidak terdapatnya satu ayat dan satu hadits pun yang berdasarkan lahirnya mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan, terlebih lagi yang menegaskan demikian. Bahkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang biasa dipakai alasan oleh fuqaha yang mensyaratkan wali hanya memuat kemungkinan yang demikian itu. Demikian pula ayat-ayat dan hadits-hadits yang dipakai alasan oleh fuqaha yang tidak mensyaratkan wali juga hanya memuat kemungkinan yang demikian.⁶²

⁶²Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 410.

BAB III

PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG KETIDAKHARUSAN IZIN DARI WALI BAGI ORANG *SAFIH* YANG MELAKUKAN AKAD NIKAH

A. Biografi Ibnu Qudamah, dan Karya-Karyanya

1. Latar Belakang Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah, nama lengkapnya Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, yang biasa dipanggil Abu Muhammad. Ia lahir di Damaskus, Suriah Syakban, tahun 541 H/1147 M dan wafat 620 H/1224 M. Ia sebagai ulama besar di bidang ilmu fikih, yang kitab-kitab fikihnya merupakan kitab standar bagi mazhab Hanbali.¹

Ibnu Qudamah, menurut para sejarawan, termasuk keturunan Umar bin al-Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin al-Khattab (Ibnu Umar). Ia hidup ketika Perang Salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam (Suriah sekarang), sehingga keluarganya terpaksa mengasingkan diri ke Yerusalem pada tahun 551 H dan bermukim di sana selama 2 tahun. Kemudian, keluarga ini pindah lagi ke Jabal Qasiyun, sebuah desa di Libanon. Di desa inilah ia memulai pendidikannya, dengan mempelajari Al-Qur'an dari ayahnya sendiri serta beberapa orang syekh di daerah itu.

¹Muhammad Sa'id Mursi, *'Udhama' al-Islam 'Ibra Arba'at, 'Asara Qurunan Min al-Zaman*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Achmad Faozan, "Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, hlm. 363.

Pada tahun 561 H, dengan ditemani pamannya, Ibnu Qudamah berangkat ke Irak untuk menimba ilmu, khususnya di bidang fikih. Ia menimba ilmu di Irak selama 4 tahun dari Syekh Abdul Qadir al-Jailani (ahli fikih yang lahir pada tahun 470 H/1077 M dan wafat pada tahun 561 H/1166 M) dan beberapa syekh lain. Kemudian ia kembali ke Damascus untuk menimba ilmu lagi dari beberapa orang ulama besar Damascus. Pada tahun 578 H ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari Syekh al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad at-Tabbakh al-Bagdadi (w. 575 H), seorang ulama besar Mazhab Hanbali di bidang fikih dan usul fikih. Kemudian ia kembali ke Baghdad dan berguru selama satu tahun kepada Ibnu al-Manni, yang juga seorang ulama besar Mazhab Hanbali di bidang fikih dan usul fikih. Setelah itu, ia kembali ke Damascus untuk menyumbangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.

Murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak saudaranya sendiri, yakni Abu al-Farj, Abdurrahman bin Muhammad bin Qudamah (ketika itu ketua Mahkamah Agung di Damascus) dan al-Imad Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi ad-Dimasyqi (di kemudian hari menjadi seorang ulama besar di kalangan Mazhab Hanbali).²

Sejak mengabdikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620 H, Ibnu Qudamah tidak pernah lagi keluar dari

²Abdul Aziz Dahlan, *et. al*, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 619

Damascus. Di samping mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabdikannya untuk menghadapi Perang Salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam. Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, cerdas dan dicintai teman-teman sejawatnya. Tidak kurang dari gurunya sendiri, Ibnu al-Manni, mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Qudamah.

Ketika ia akan meninggalkan Irak setelah berguru kepada Ibnu al-Manni, gurunya ini enggan melepasnya, seraya berkata: "Tinggallah engkau di Irak ini, karena jika engkau berangkat, tak ada lagi ulama yang sebanding dengan engkau di Irak." Sedang Ibnu Taimiyah mengakui, "Setelah al-Auza'i (salah seorang pengumpul hadis pertama di Syam), ulama besar di Suriah adalah Ibnu Qudamah."³

2. Karya-Karyanya

Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibnu Qudamah dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui karya-karya tulis yang ditinggalkannya. Sebagai seorang ulama besar di kalangan Mazhab Hambali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam Mazhab Hanbali. Menurut Penelitian Abdul Aziz Abdurrahman as-Sa'id, seorang tokoh fikih Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam

³M. Syarafuddin Khattab, *et al*, *Tahqiq al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007, hlm. 8 – 11.

berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah, dalam ukuran besar dan kecil.

Karya-karya besar Ibnu Qudamah antara lain; 1) *al-Mughni'*, kitab fikih dalam 10 jilid, memuat seluruh permasalahan fikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang; telah dicetak ulang beberapa kali dan beredar di berbagai belahan dunia Islam; 2) *al-Kafi*, kitab fikih dalam 3 jilid besar, merupakan ringkasan bab fikih; 3) *al-Muqni'*, kitab fikih dalam jilid besar, tetapi tidak selengkap *al-Mughni* 4) *'Umdah fi al-Fiqh*, kitab fikih kecil yang disusun untuk para pemula, dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an dan sunah; 5) *al-Raudah Nazir fi Usul al-Fiqh*, membahas persoalan usul fiqh dan merupakan kitab usul tertua dalam Mazhab Hambali yang di kemudian hari diringkas oleh Najmuddin al-Tufi; 6) *Mukhtasar 'lal al-Hadis*, berbicara Tentang cacat-cacat hadis; 7) *Mukhtasar fi Garib Hadis* membicarakan hadis garib; 8) *al-Burhan Masa'il al-Qur'an*, membahas ilmu-ilmu Al-Qur'an; kitab al-Qadr, berbicara tentang kadar. 10), *fada'il as-Sahabah*, membahas kelebihan sahabat; 11) *Kitab at-Tawwabin fi al-Hadis*, membicarakan masalah-masalah tobat dalam hadis, sendiri dari 2 jilid; 12) *al-Mutababbin fillah*, tentang tasawuf; 13) *al-Istibsar fi Nasab al-Ansar*, berbicara tentang keturunan orang-orang Ansar; 14) *Manasik hajj* tentang tata cara haji; dan 15) *Zamm* membahas persoalan takwil.⁴

⁴Abdul Aziz Dahlan, *et. al*, (editor), *op.cit.*, hlm. 620.

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai bidang ilmu keislaman, namun di kalangan akademi Islam ia lebih dikenal dan menonjol sebagai ahli fiqih dan ushul fikih. Dua kitabnya, yakni *al-Mugni* dan *al-Raudah an-Nazir*, dijadikan rujukan oleh ulama. Kitab *al-Mugni* di bidang fikih, yang merupakan kitab standar di kalangan Mazhab Hanbali, merupakan buku rujukan di perguruan tinggi Islam di berbagai negara Islam, bahkan juga di Eropa dan Amerika termasuk di Indonesia. Keistimewaan kitab tersebut adalah bahwa pendapat kalangan Mazhab Hambali satu masalah senantiasa dibandingkan dengan pendapat mazhab lainnya. Setiap pendapat dari kalangan Mazhab Hanbali maupun dari mazhab lainnya, dikemukakan dalilnya secara tuntas, baik dalil dari Al-Qur'an maupun dari sunah Rasulullah SAW. Jika pendapat Mazhab Hanbali berbeda dengan pendapat mazhab lainnya, senantiasa diberikan alasan dari ayat atau hadis terhadap pendapat kalangan Mazhab Hanbali itu, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan "*wa lana hadis Rasulillah...*" (alasan kami adalah hadis Rasulullah). Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat atau hadis, sesuai dengan prinsip Mazhab Hanbali, terlihat jelas dalam kitab tersebut, karenanya, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi akal.⁵

Demikian juga kitab *al-Raudah an-Nazir* di bidang usul fikih, yang merupakan kitab tertua di bidang usul dalam Mazhab Hanbali, sejalan dengan prinsip usul fikih dalam mazhab tersebut dan dianggap sebagai

⁵[http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Ibnu Qudamah.html](http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Ibnu%20Qudamah.html), diakses tanggal 2 Maret 2009

kitab usul standar dalam mazhab tersebut. Dalam kitab ini pun, Ibnu Qudamah membahas berbagai persoalan usul fikih dengan membuat perbandingan dengan teori usul mazhab lainnya. Ia tidak berhenti membahas suatu masalah, sebelum setiap pendapat didiskusikan dari berbagai aspek. Pembahasan kemudian ditutup dengan mengajukan pendapatnya atau pendapat Mazhab Hanbali. Karena cara membahas berbagai persoalan fikih dan usul inilah, kedua kitab Ibnu Qudamah tersebut dijadikan rujukan, baik oleh ulama sesudahnya dari berbagai mazhab maupun oleh para ilmuwan di zaman sekarang.⁶

B. Pendapat Ibnu Qudamah tentang Ketidakharusan Izin dari Wali bagi Orang *Safih* yang Melakukan Akad Nikah

Sebelum mengemukakan pendapat Ibnu Qudamah, penulis hendak mengemukakan selintas pandangan ulama lainnya, bahwa keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam nikah menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad nikah itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di

⁶*Ibid.*

kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad nikah. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara ibarat al-nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad nikah. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di samping itu, terdapat pula ayat-ayat Al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri pernikahannya. Di antara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Surat. al-Baqarah (2) ayat 221:

(221 :)

Artinya: Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. (2): 221).⁷

⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm 53.

Surat al-Baqarah (2) ayat 232:

(232 :)

Artinya: Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah dengan bakal suami mereka. (QS. al-Baqarah (2): 232).⁸

Surat.an-Nur (24) ayat 32:

(32 :)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk nikah) di antara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (QS. an-Nur (24): 32).⁹

Ibarat nash ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali; karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk nikah, ayat kedua larangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk menikahkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam ketiga ayat itu khitab Allah berkenaan dengan pernikahan dialamatkan kepada wali, dapat pula dipahami dari pada keharusan adanya wali dalam pernikahan. Dari pemahaman ketiga ayat tersebut di atas jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan.

⁸*Ibid*, hlm. 57.

⁹*Ibid*, hlm. 549.

Memang hal-hal yang berkenaan dengan nikah dan menikahkan Allah mengalamatkan titahnya kepada wali, karena dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat Arab waktu turun ayat-ayat mi pernikahan itu berada di tangan wali. Ayat-ayat itu sepertinya memberikan pengukuhan (*taqrir*) adanya wali. Meskipun demikian, rasanya tidak mungkin dari *taqrir* itu ditetapkan hukum wajib apalagi rukun dalam pernikahan.

Di samping itu, terdapat pula ayat Al-Qur'an yang memberikan pengertian perempuan itu nikah sendiri tanpa mesti memakai wali. Di antaranya adalah:

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230:

:)

(230

Artinya: Kemudian jika suami menalaknya (setelah talaq kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila dia telah nikah dengan suami lain.¹⁰

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 232:

(232 :)

Artinya: Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah dengan bakal suami mereka. (QS. al-Baqarah (2): 232).¹¹

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 234:

¹⁰*Ibid*, hlm. 56.

¹¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm 57.

(234 :)

Artinya: Bila telah sampai iddahnya tidak ada halangannya bagimu. Terhadap apa yang diperbuatnya terhadap dirinya secara baik.¹²

Ayat pertama di atas dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bekas suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Ayat kedua dengan jelas menyatakan perempuan itu melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan ayat ketiga perempuan itu berbuat atas dirinya (maksudnya menikah). Dalam ketiga ayat tersebut *fa'il* atau pelaku dari pernikahan itu-adalah perempuan itu sendiri tanpa disebutkan adanya wali.

Dari ayat-ayat kelompok kedua tersebut di atas ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri pernikahannya dan tidak perlu wali mengakadkannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akal dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya. Jumhur ulama di samping menggunakan ayat-ayat kelompok pertama di atas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam pernikahan, menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadits-hadits dibawah ini:

- a. Hadits Nabi dari Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadits kecuali an-Nasa'i bunyinya:

"
:
13 ()".

¹²*Ibid.*, hlm. 57.

Artinya : Bersumber dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda : tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang wali (HR. Ahmad dan Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa'i)

- b. Hadits Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadits selain al-Nasai

¹⁴()

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Hasan dari Ibnu Lahi'ah dari Ja'far bin Rabi'ah dari Ibnu Syihab dari Urwah bin al-Zubair dari 'Aisyah berkata: sesungguhnya Rasulullah bersabda: perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, pernikahannya adalah batal. (HR. Ahmad).

- c. Hadits dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:

¹⁵()

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Jamil bin al-Hasan al-Atakki dari Muhammad bin Marwan al-'Uqaili dari Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirrin dari Abu Hurairah berkata:

¹³*Ibid.*, hlm. 193.

¹⁴Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadits No. 1670 dalam CD program *Mausu'ah Hadits al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

¹⁵Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Ibnu Majah al-Qazwini, hadits No. 1750 dalam CD program *Mausu'ah Hadits al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

telah bersabda Rasulullah Saw: perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. (HR. Ibnu Majah).

Sebagaimana diketahui bahwa Ibnu Qudamah berbicara persoalan ketidakharusan izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah termuat dalam kitabnya di antaranya dalam kitab *al-Mughni*. Kitab ini dianggap sebagai salah satu kitab yang membahas tentang fikih Islam secara umum dan fikih Madzhab Hanbali secara khusus. Sebab, penulis kitab tersebut telah menyusunnya dalam bentuk *Fiqhul Muqarin* (perbandingan antar mazhab). Ibnu Qudamah tidak hanya menjelaskan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam kitab *Mukhtashar* dan menerangkan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya saja, tetapi dia juga menganalisa semua poin yang berkaitan dengan suatu masalah yang disebutkan di dalamnya. Dia menyebutkan perbedaan riwayat yang berkembang di kalangan para pengikut Madzhab Hanbali mengenai masalah tersebut, lalu dia juga memaparkan perbedaan riwayat yang terjadi di antara sejumlah imam yang berasal dari berbagai madzhab.

Bahkan, dia juga menyebutkan madzhab sejumlah ulama yang sudah tidak berkembang lagi karena tidak adanya para pengikut yang berusaha untuk menyebarkanluaskannya, seperti madzhab para tabi'in dan juga para ulama setelahnya, yaitu seperti madzhab Hasan Al Bashari, Atha', Sufyan Ats-Tsauri dan lain sebagainya. Sebagaimana Ibnu Qudamah juga menyebutkan dalil-dalil yang digunakan oleh orang yang mengungkapkan suatu pendapat dalam

masalah yang disebutkan. Lalu dia menjelaskan dalil-dalil tersebut dilihat dari sisi kekuatan dan kelemahannya.

Tanpa diragukan lagi, kitab *Al Mughni* ini merupakan kajian fikih terbaik yang telah disusun dalam format Fikih Perbandingan, dimana tidak ada satu ahli fikih pun dari madzhab-madzhab lain yang menyusun sebuah kitab dengan menggunakan metodologi seperti ini. Meskipun ada orang yang berusaha untuk melakukan hal seperti itu, akan tetapi kajiannya hanya bersifat sederhana saja. Hal ini dapat kita jumpai dalam kitab *Bidayah Al Mtijtahid* karya Ibnu Rusyd dan *Al Qawanin Al Fiqhiyyah* karya Ibnu Jaza Al Kilabi. Kedua kitab tersebut disajikan dalam bentuk yang sederhana dan ringkas. Sedangkan kitab *Al Mughni* dianggap sebagai sebuah ensiklopedi fikih yang telah dipersembahkan oleh Ibnu Quddamah kepada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang Fikih Perbandingan. Semoga Allah SWT membalas sumbangsih yang telah diberikannya kepada para penuntut ilmu dan para ahli fikih dari kalangan umat Islam dengan balasan yang terbaik.

Pembaca kitab ini dapat merasakan manisnya ungkapan dan indahnya gaya bahasa yang digunakan oleh Ibnu Quddamah. Hal itulah yang biasa kita temukan dalam kitab-kitab rujukan utama dalam bidang Fikih Islam yang membanding-bandingkan antar sejumlah pendapat, memaparkan dalil-dalilnya, dan menjadikan Al Qur'an, As-Sunnah, serta pendapat-pendapat para sahabat dan tabi'in senior sebagai sumber dalilnya.

Oleh karena itu, maka para ulama yang berasal dari berbagai macam madzhab pun memandang kitab *Al Mughni* ini dengan pandangan yang penuh

penghargaan dan menganggapnya sebagai salah satu referensi dalam bidang Fikih Perbandingan yang dapat meningkatkan derajat pembacanya dari derajat taklid ke derajat yang lebih tinggi, yaitu derajat *ijtihad*, *at-tarjih ash-shahih* (menganggap kuat suatu pendapat dengan cara yang benar), serta mengambil pendapat yang kuat berikut dalil dan bukti-bukti penguatnya.

Karena Ibnu Quddamah telah menyusun kitab *Al Mughni* ini dengan menggunakan metodologi yang baik, dimana hal itu telah diketahui oleh para ulama, maka mereka pun menyanjungnya dan juga memuji keindahan kitab itu. Penulis kitab *Al Wafi bi Al Wafayat* berkata, "Dia adalah orang nomor satu pada masanya. Dia merupakan seorang imam yang sangat menguasai ilmu *khilaf* (perbandingan madzhab), *fara'idh* (ilmu waris), *ushul fikih*, *fikih*, *nahwu*, *hisab* (ilmu hitung), serta ilmu *nujum* (astronomi) dan *al manak*. Selama jangka waktu tertentu, dia telah menjadikan orang-orang sibuk untuk mengkaji kitab *Al Khiraqi*, *Al Hidayah*, dan kemudian kitab *Mukhtashar Al Hidayah*. Setelah itu, dia pun menjadikan orang-orang sibuk untuk mengkaji kitab-kitab hasil karyanya."

Sabth Ibnu Al Jauzi menjelaskan tentang akidah Ibnu Quddamah dalam perkataannya, "Dia adalah orang yang memiliki akidah yang benar dan sangat benci kepada kelompok *musyabbihah* (yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya). Dia pernah berkata, 'Di antara syarat sahnya *tasybih* (menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain) adalah jika seseorang dapat melihat sesuatu tersebut, setelah itu barulah dia menyerupakannya dengan yang lain. Jika demikian, maka adakah orang yang dapat melihat Allah hingga

dia dapat menyerupakan-Nya dengan sesuatu yang lain'. Menurutku perkataan Ibnu Quddamah, 'Adakah orang yang dapat melihat Allah hingga dia dapat menyerupakan-Nya dengan sesuatu yang lain?' merupakan perkataan yang sangat bagus, karena sesungguhnya orang yang telah melihat Allah dengan mata kepalanya, maka dia akan berkata, 'Aku telah melihat Tuhanku', setelah itu dia pun akan terdiam dan tidak dapat menyerupakan-Nya dengan sesuatu apapun."

Ibnu Rajab menjelaskan tentang sikap Ibnu Quddamah kepada para *mutakallim* (ahli ilmu Kalam), "Dia memandang tidak perlu berdiskusi dengan para *mutakallim* tentang masalah-masalah ilmu Kalam. Dia memiliki perhatian yang besar terhadap riwayat (dari orang-orang terdahulu) baik dalam masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal prinsipil (akidah) maupun hal-hal lainnya."

Dhiya'uddin Al Maqdisi mengutip perkataan Al Baha' yang menjelaskan tentang keberanian Ibnu Quddamah, "Dia pernah maju (ke medan pertempuran) guna menghadapi pasukan musuh hingga dia terluka di bagian telapak tangannya. Dia juga selalu melempari pasukan musuh (dengan menggunakan panah)."

Sementara Ibnu Muflih, penulis kitab *Al Mubdi'*, berkata, "Muwaffaquddin telah menyibukkan dirinya guna menyusun salah satu kitab tentang Islam. Cita-citanya untuk menyelesaikan kitab tersebut pun tercapai. Kitabnya itu merupakan kitab yang sangat bagus dalam Mazhab Hanbali. Dia telah capai dalam menyusun kitab tersebut dan telah melakukannya dengan

baik. Kitabnya itu telah menghiasi Mazhab Hanbali dan telah dibaca oleh banyak orang di hadapannya."

'Izzuddin bin Abdussalam Asy-Syafi'i juga berkata, "Aku tidak pernah melihat satu kitab tentang Islam pun yang kualitasnya menyerupai kualitas kitab *Al Muhalla* dan *Al Majalla* karya Ibnu Hazm, serta kitab *Al Mughni* karya Syaikh Muwaffaquddin."

Dalam hubungannya seorang *safih* yang menikah tanpa izin dari wali, maka Imam Syafi'i dan Imamiyah menyatakan bahwa seorang *safih* yang hendak menikah harus memperoleh izin dari wali, jika tidak mendapat izin maka nikahnya tidak sah. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah bahwa akad nikah yang dilakukan orang *safih* (dungu) adalah sah, baik dia memperoleh izin dari walinya atau tidak.¹⁶ Hal ini sebagaimana ia katakan:

,

.

17

Artinya: Hukumnya anak kecil dan orang gila sama seperti hukumnya orang *safih* (dungu/idiot), sang wali boleh memberi ijin kepadanya dalam sebagian perbuatan sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sah dan lulus di antaranya ialah nikah,

¹⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 317.

¹⁷Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, Juz 11, Kairo: Daar al-Manar, 1367, hlm. 235.

maka bilamana wali mengizinkan dia untuk menikah kemudian dia melaksanakan sendiri maka perbuatannya itu sah. Jikalau seorang *safih* menikah tanpa mendapat ijin dari walinya maka nikahnya itu sah, kemudian apabila *safih* ingin menikah untuk mendapatkan kesenangan atau pelayanan maka dia boleh melakukannya meskipun tidak diijinkan walinya. Sama juga dia telah meminta kepada walinya yang kemudian ditolak maupun tidak ditolak. Namun nikahnya tidak sah kecuali dengan mahar *misil*.

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif Ibnu Qudamah, akad nikah yang dilakukan orang *safih* (dungu) adalah sah, baik dia memperoleh izin dari walinya atau tidak. Namun demikian, untuk sahnya nikah orang *safih* itu, ia harus memberi mahar *misil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.¹⁸ Bila terjadi demikian, mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude), apabila tidak ada, maka *misil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar *misil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

1. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Kalau maskawin *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 55

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG

KETIDAKHARUSAN IZIN DARI WALI BAGI ORANG *SAFIH* YANG

MELAKUKAN AKAD NIKAH

A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Ketidakharusan Izin Dari Wali Bagi Orang *Safih* yang Melakukan Akad Nikah

Safih (orang bodoh) ialah orang-orang yang tidak bisa memutar hartanya untuk dikembangkan, maka dia membelanjakan hartanya untuk hal-hal kebatilan dan yang tidak halal dan ia membelanjakan dengan boros dan berlebihan. Termasuk kepada *safih* (orang bodoh dan dungu) adalah orang yang kebiasaannya menghambur-hamburkan hartanya tanpa tujuan yang diridai syara', seperti membelanjakan hartanya untuk membeli khamar, untuk berjudi, atau pedagang yang tidak mengerti cara berdagang sehingga sering ditipu orang, atau orang yang menghambur-hamburkan hartanya untuk kepuasan nafsu seksualnya. Orang-orang seperti ini, demi kemaslahatan hartanya, menurut jumhur ulama, harus dikenakan hukum al-hijr, melalui ketetapan hakim. Dengan demikian syarat seseorang dinyatakan *safih* yaitu 1) dungu/bodoh/idiot; 2) boros atau menghambur-hamburkan harta.¹

Para ulama mazhab, kecuali Abu Hanifah dan sebagian kecil ulama mazhab, sepakat bahwa orang *safih* harus dicegah dari membelanjakan hartanya. Keadaannya adalah seperti anak kecil dan orang gila, kecuali bila

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 207.

memang dalam membelanjakan hartanya itu dia memperoleh izin dari walinya. Akan tetapi dia memiliki kebebasan mutlak dalam bertindak yang sedikit atau banyak, tidak berhubungan dengan masalah harta.² Orang *safih* tidak akan lepas dari penahanan haknya itu, hingga dia menjadi dewasa dan mengerti, hal ini berdasar firman Allah yang berbunyi:

{5}

(6-5 :)

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (*safih*) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu), dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah mengerti, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (QS.an-Nisa: 5-6)".³

Pendapat tersebut di atas dikemukakan oleh Imamiyah, Syafi'i, Maliki, Hambali, Abu Yusuf dan Muhammad dua orang pengikut Abu Hanifah. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa: Kedewasaan bukanlah merupakan persyaratan bagi penyerahan harta kepada pemiliknya, dan tidak pula bagi sahnya tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan harta-benda. Kalau seseorang mencapai usia balig dan dia mengerti lalu mengalami ke-*safih*-an, maka tindakan-tindakannya dinyatakan sah, dan tidak dibenarkan menghalang-halangnya, bahkan seandainya usianya belum menginjak dua

²Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 688.

³Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1978, hlm. 115.

puluh lima tahun. Demikian pula halnya bila seseorang mencapai usia baligh tetapi dia belum mengerti (*safih*) di mana ke-*safih*-annya itu merupakan kelanjutan dari masa kecilnya dalam keadaan seperti ini, ketika dia berumur dua puluh lima tahun, dia tidak boleh lagi.⁴

Pendapat ini secara jelas berbeda dengan *ijma'* umat secara keseluruhan, bahkan dengan apa yang selama ini dikenal sebagai sesuatu kemestian dalam agama, dan *nas* Quran, yaitu, "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya (*safih*) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)..."

Untuk lebih memperjelas kedudukan orang *safih*, maka posisi orang ini dalam kitab fikih dapat diketahui dalam pembahasan bab *al-hijr* (pengampunan, pembatasan, larangan menggunakan harta).⁵ Sebagaimana diketahui bahwa jika dilihat dari segi penyebab seseorang ditetapkan berada dalam *al-hijr*, maka terdapat beberapa akibat hukum yang terkait dengan orang-orang yang berada di bawah *al-hijr*, yaitu:⁶

- a. Akibat *al-hijr* terhadap anak yang belum cakap melakukan tindakan hukum. Dalam membahas hukum tindakan anak kecil, ulama Hanafiyah dan Malikiyah membedakan anak yang belum *mumayyiz* (menurut mereka belum mencapai umur tujuh tahun) dengan anak yang sudah *mumayyiz* (yang berumur tujuh tahun ke atas). Sedangkan ulama Syafi'iyah dan

⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 689.

⁵Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 210.

⁶*Al-hijru* adalah larangan bagi seseorang untuk mengelola kekayaannya karena masih kecil, atau gila, atau akal nya tidak sempurna, atau bangkrut. Lihat Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 337.

Hanabilah tidak membedakan anak yang *mumayyiz* dengan anak yang belum *mumayyiz*. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, perbedaan ini penting dilakukan karena Rasulullah sendiri dalam sebuah sabda beliau mengatakan:

⁷()

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdur Rahman ath-Thufariy dan Abdullah bin Bakr al-Sahmiy al-Ma'na dari Sawwar Abu Hamzah dari Amri bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata: telah bersabda Rasulullah Saw: Suruh anakmu shalat, apabila mereka telah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka ketika umur sepuluh tahun". (HR Ahmad).

Dengan demikian, ulama Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa anak yang berumur tujuh tahun termasuk ke dalam kategori *mumayyiz*, dan dalam hukum-hukum tertentu mereka telah dituntut untuk melaksanakannya. Perbuatan hukum anak itu boleh dibedakan antara tindakan yang bersifat perbuatan dan tindakan yang bersifat perkataan.

Para ulama fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah) menyatakan bahwa mengenai tindakan hukum anak yang bersifat perbuatan, seperti merusak barang orang lain, maka statusnya sebagai orang yang dalam pengampuan tidak berlaku, karena pengampuan itu hanya tertuju kepada perkataan, bukan pada perbuatan. Oleh sebab itu,

⁷Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 345 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

setiap barang atau jiwa yang dirusak atau dihilangkan anak kecil, wajib diganti atau dibayar dendanya. Lain halnya apabila tindakan hukum itu bersifat perkataan atau pernyataan.⁸

Jika tindakan hukum itu dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa perkataan atau pernyataannya itu dianggap batal, meskipun tindakannya itu menguntungkan maupun merugikan dirinya, karena ia dinilai belum cakap melakukan tindakan hukum. Akan tetapi, apabila tindakan itu dilakukan oleh anak *mumayyiz*, maka, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, perlu dibedakan antara tindakan yang menguntungkan dan merugikan, atau antara menguntungkan dan merugikan dirinya.⁹

Apabila tindakan itu menguntungkan dirinya, seperti menerima sedekah atau wasiat, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tindakannya sah, tanpa harus ada persetujuan dari walinya. Apabila tindakannya itu merugikan dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka para ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa tindakan itu dianggap tidak sah dan persetujuan dari wali pun tidak berlaku, karena tidak dibenarkan adanya justifikasi dalam hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, ulama Hanabilah mengecualikan hukum tindakan anak *mumayyiz* yang merugikan itu. Menurut mereka, apabila wali anak itu mengizinkan tindakan itu, maka hukumnya sah. Apabila tindakan anak *mumayyiz* ini bersifat antara menguntungkan dan merugikan bagi dirinya, seperti jual

⁸Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 205.

⁹*Ibid*

beli dan sewa menyewa, maka ulama Hanafiyah dan Malikiyah menganggap tindakan hukum itu sah apabila diizinkan walinya. Akan tetapi, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, tindakan hukum anak kecil (yang bersifat spekulasi), baik *mumayyiz* maupun belum, tidak sah.¹⁰

Mazhab Hanbali menganggap sah tindakan anak yang telah *mumayyiz* (yang tidak bersifat spekulasi), apabila diizinkan walinya.¹¹ Akibat hukum lain dari pengampuan anak kecil ini adalah bahwa para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa harta anak kecil itu tidak boleh diserahkan kepada mereka, karena Allah dalam surat an-Nisa' ayat 6 menyatakan:

(6 :)

Artinya: "Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya". (QS. an-Nisa: 6).¹²

Menurut ulama fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah), ayat ini menjelaskan bahwa penyerahan harta kepada anak kecil itu apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu cukup umur (balig) dan cerdas. Sebelum kedua syarat itu terpenuhi, maka wali tidak boleh menyerahkan harta anak itu kepadanya. Untuk menyatakan anak itu telah balig atau belum, para ulama fiqh mengatakan boleh dilihat dari beberapa indikasi, seperti dari segi umur atau dari segi tanda-tanda biologisnya,

¹⁰*Ibid*, hlm. 205.

¹¹Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 211.

¹²Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 116.

seperti mimpi, haid dan hamil. Sedangkan untuk menilai anak itu apakah sudah cerdas atau belum, menurut jumhur ulama, harus senantiasa diuji dalam membelanjakan hartanya.¹³

Apabila ia telah terampil mengelola hartanya sendiri, dalam artian tidak merugikan dirinya lagi, maka ia dianggap telah cerdas. Akan tetapi, menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi ukuran itu adalah keterampilan dalam mengelola harta dan komitmennya terhadap agamanya. Apabila ternyata anak itu telah balig dan cerdas, sesuai dengan kriteria balig dan cerdas yang dikemukakan para ulama di atas, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa status di bawah pengampuannya hilang dengan sendirinya, tanpa harus ditetapkan hakim; karena penetapan mereka di bawah pengampuan bukan melalui ketetapan hakim, maka pencabutan *al-hijr* bagi mereka pun tidak perlu melalui ketetapan hakim. Akan tetapi, satu riwayat dari ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perlu adanya ketetapan hakim.¹⁴

Apabila anak itu belum memenuhi dua syarat di atas, maka wali anak itu tidak boleh menyerahkan harta itu kepada anak itu dan yang bertindak sebagai pengelola dan pemelihara harta itu adalah walinya dan pengelolaan terhadap harta itu harus senantiasa bertitik tolak pada kemaslahatan anak itu. Akan tetapi, dalam memelihara atau mengelola harta itu seorang wali harus waspada. Apabila wali itu orang kaya, maka ia tidak boleh mengambil nafkahnya dari harta anak itu. Akan tetapi, bila

¹³Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 206.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 206.

wali itu orang miskin, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa wali boleh mengambil nafkahnya dari harta anak itu, sesuai dengan keperluan sehari-hari.

- b. Akibat *al-hijr* terhadap orang gila. Para ulama fiqh membedakan hukum orang gila yang sifatnya permanen (tidak sembuh-sembuh) dengan gila yang kambuh pada waktu-waktu tertentu saja, dalam artian, suatu saat ia gila dan pada saat lainnya ia sembuh. Orang gila bentuk pertama, disamakan dengan orang yang tidak berakal sama sekali. Oleh sebab itu, tindakan hukum mereka sama dengan tindakan hukum anak kecil yang belum *mumayyiz*. Seluruh tindakan hukum yang mereka lakukan yang sifatnya merugikan diri mereka sendiri, seperti talak, hibah, dan wakaf, dianggap batal. Adapun orang gila dalam bentuk kedua, apabila ia melakukan tindakan hukum ketika gilanya kambuh, maka tindakan hukumnya dianggap tidak sah; wakaf, hibah, dan sedekahnya dibatalkan.¹⁵

Akan tetapi, apabila tindakan itu dilakukannya pada waktu gilanya tidak kambuh, maka tindakannya dianggap sah karena ketika itu ia terbebas dari ikatan pengampuannya. Apabila ia menceraikan isterinya, misalnya maka cerainya itu berlaku sah.

Akibat *al-hijr* terhadap orang bodoh/dungu (*safih*). Para ulama fiqh menyatakan bahwa termasuk kepada *safih* (orang bodoh dan dungu) adalah orang yang kebiasaannya menghambur-hamburkan hartanya tanpa tujuan yang diridlai syara', seperti membelanjakan hartanya untuk membeli khamar, untuk

¹⁵Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 211.

berjudi, atau pedagang yang tidak mengerti cara berdagang sehingga sering ditipu orang, atau orang yang menghambur-hamburkan hartanya untuk kepuasan nafsu seksualnya. Orang-orang seperti ini, demi kemaslahatan hartanya, menurut jumhur ulama, harus dikenakan hukum *al-hijr*, melalui ketetapan hakim. Seluruh tindakan hukum yang bersifat merugikan dirinya dianggap batal, seperti wakaf, sedekah dan hibah. Akan tetapi, tindakan hukum, seperti jual beli, nikah dan talak, untuk sah atau tidaknya tergantung kepada penetapan hakim. Apabila hakim melihat bahwa dalam tindakan hukum yang dilakukan itu terkandung kemaslahatan untuk dirinya, maka hakim boleh mengizinkannya. Akan tetapi, apabila mengandung kerugian, hakim berhak membatalkan jual beli atau nikah itu. Di kalangan ulama Hanafiyah terjadi perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila orang bodoh itu telah balig dan berakal, maka tindakan hukumnya dianggap sah, sekalipun merugikan dirinya sendiri, karena untuk penetapan mereka di bawah pengampuan merupakan pengekangan terhadap hak asasi mereka.¹⁶

Dalam *Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan:

17 .

¹⁶*Ibid.*, hlm. 212.

¹⁷Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, Al-Faqih, *Bidayat al-Mujtahid Wa nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, juz 2, 1409H/1989M, hlm. 6.

Artinya: Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah, Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali adalah dengan mengemukakan alasan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

...

(234:)

Artinya: "Kemudian apabila telah habis masa *iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para Wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka" (Q.S. Al-Baqarah: 234).¹⁸

Akad nikah termasuk akad perjanjian. Dalam hubungannya seorang *safih* yang menikah tanpa izin dari wali, maka Imam Syafi'i dan Imamiyah menyatakan bahwa seorang *safih* yang hendak menikah harus memperoleh izin dari wali, jika tidak mendapat izin maka nikahnya tidak sah. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah bahwa akad nikah yang dilakukan orang *safih* (*dungu*) adalah sah, baik dia memperoleh izin dari walinya atau tidak.¹⁹ Hal ini sebagaimana ia katakan:

¹⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1978, hlm 57.

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 317.

Artinya: Hukumnya anak kecil dan orang gila sama seperti hukumnya orang *safih* (dungu/idiot), sang wali boleh memberi ijin kepadanya dalam sebagian perbuatan sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sah dan lulus di antaranya ialah nikah, maka bilamana wali mengizinkan dia untuk menikah kemudian dia melaksanakan sendiri maka perbuatannya itu sah. Jikalau seorang *safih* menikah tanpa mendapat ijin dari walinya maka nikahnya itu sah, kemudian apabila *safih* ingin nikah untuk mendapatkan kesenangan atau pelayanan maka dia boleh melakukannya meskipun tidak diijinkan walinya. Sama juga dia telah meminta kepada walinya yang kemudian ditolak maupun tidak ditolak. Namun nikahnya tidak sah kecuali dengan mahar misil.

Menurut penulis, orang *safih* sebaiknya dibolehkan menikah meskipun tanpa izin dari walinya, asalkan niat atau maksudnya menikah itu bermanfaat bagi orang lain dan umum. Atas dasar itu, penulis mendukung pendapat Ibnu Qudamah yang berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan orang *safih* (dungu) adalah sah, baik dia memperoleh izin dari walinya atau tidak.

Menurut penulis, setiap orang yang berkehendak menikah, maka tidak ada larangan untuk melakukannya selama memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak melanggar hukum positif.. Siapa pun orangnya terlepas apakah

²⁰Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, Juz 11, Kairo: Daar al-Manar, 1367, hlm. 235.

orang itu bodoh/dungu atau cerdas/pintar, yang penting hukum nikah baginya wajib atau sunnah. Sekalipun tidak *safih*, namun jika pernikahan itu dimaksudkan untuk hal yang tidak baik maka apalah artinya pintar dan cerdas itu kalau pada akhirnya merugikan dirinya sendiri dan bahkan orang lain. Sedangkan sebabnya orang *safih* tidak boleh melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta benda adalah karena menurut perkiraan para ahli bahwa orang *safih* sangat berkecenderungan menyalahgunakan harta yang intinya pemborosan atau menyia-nyiakan harta. Jika alasannya karena itu, maka apabila sebaliknya yaitu penggunaannya jelas, terarah dan berdampak mendatangkan kebaikan maka hal itu adalah sah dan tidak terlarang, demikian juga jika niat orang *safih* melakukan pernikahan itu untuk membangun rumah tangga yang bahagia maka selayaknya ia sah menikah tanpa izin atau izin dari wali.

B. Analisis Metode *Istinbat* Hukum Ibnu Qudamah tentang Ketidakharusan Izin dari Wali bagi Orang *Safih* yang Melakukan Akad Nikah

Dalam perspektif Ibnu Qudamah bahwa ketidakharusan izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah adalah karena orang *safih* diqiyaskan dengan laki-laki pada umumnya yang tidak perlu wali. Selain itu pernikahan tidak menyangkut harta benda melainkan masalah kodrat biologis. Atas dasar itu pernikahan orang *safih* dianggap sah meskipun tidak ada izin dari wali. Dengan demikian *istinbat* yang dipakai Ibnu Qudamah adalah *qiyas*.

Untuk memperjelas masalah ini, maka bisa dibandingkan dengan pendapat ulama lain, misalnya Imam al-Syafi'i. Menurutnya wali dalam

pernikahan adalah suatu keharusan dan menjadi bagian dari rukun nikah, sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah wali dalam pernikahan adalah sunnah dan oleh karenanya seorang perempuan yang dewasa (*al-'aqilah-al-balighah*) bisa menikahkan dirinya sendiri.

Penulis melihat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang kedudukan wali dalam pernikahan disebabkan oleh perbedaan dalam menginterpretasikan ketentuan normatif baik al-Qur'an maupun al-Hadits. Perbedaan itu lahir karena kerangka metodologis yang digunakan berbeda sehingga melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda pula. Berikut ini pemetaan perbedaan pendapat di kalangan ulama dengan argumentasi yuridis (dalil) masing-masing.

1. Pendapat ulama yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan dan menjadikannya sebagai rukun pernikahan dan pernikahan tanpa adanya wali dianggap tidak sah adalah Imam al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal dan Malik ibn Anas²¹ yang mendasarkan pada dalil: Dalil al-Qur'an berikut ini:

(221 :)

Artinya: Dan janganlah kamu menikahkan wanita-wanita mukminat dengan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sehingga mereka beriman. (QS. Al-Baqarah: 221).²²

²¹Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005, hlm. 147-148.

²²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 53.

(232 :)

Artinya: Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya maka janganlah kamu (wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah mendapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. (QS. al-Baqarah: 232).²³

(32 :)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu dan orang-orang yang shalih di antara hambamu yang laki-laki dan hambamu yang perempuan. (QS. an-Nur: 32).²⁴

Menurut ulama yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan memahami *khitab* ayat al-Qur'an di atas ditujukan kepada para wali anak perempuan, sehingga seorang wali mempunyai otoritas penuh atas anak perempuannya untuk menikahkan, tapi tidak ditujukan untuk orang *safih*.

Menurut Sayyid Sabiq, surat al-Baqarah ayat 232 ini turun berkaitan dengan riwayat Muaqqil bin Yasar yang menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dirinya. Katanya "Saya menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian diceraikannya. Ketika 'iddahnya habis, ia datang lagi meminangnya. Maka saya jawab: dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan, tapi kemudian kamu ceraikan. Kini kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selama-

²³*Ibid.*, hlm. 56.

²⁴*Ibid.*, hlm. 549.

lamanya. Lelaki ini orangnya biasa. Tetapi bekas istrinya mungkin mau kembali kepadanya. Lalu Allah menurunkan ayat ini "maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka", kemudian saya berkata "sekarang saya menerima, wahai Rasulullah, dengan ucapannya:...., maka aku nikahkan saudaraku itu kepadanya".²⁵

Dengan melihat sebab turunnya ayat 232 surat al-Baqarah di atas jelas sekali bahwa *khitab* pada lafaz "*fala ta'dhuluhunna*" adalah para wali. Dengan demikian posisi seorang perempuan dalam hal pernikahan berada pada kekuasaan walinya. Kalau seorang perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri sudah barang tentu tidak perlu dinikahkan oleh saudara lelakinya yang sesungguhnya bertindak sebagai wali.²⁶ Larangan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri antara lain karena kurang akalunya (*nuqshan al-'aql*) sehingga hukum anak perempuan dalam bertasharruf sama dengan orang tidak mampu mengelola hartanya.²⁷

Hadits Rasulullah:

".

²⁸ () ."

Artinya: Dari Abi Musa sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: Tidak sah nikah tanpa wali.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* VII, Terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987, hlm. 13.

²⁶Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 7

²⁷Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005, hlm. 149 – 150.

²⁸Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy Syaukani, *Nail al –Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhbar*, Juz 4, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tth, hlm. 193.

Artinya : Dari Aisyah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. bersabda: Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah mencampurnya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya. Diriwayatkan oleh Al Arba'ah selain An-Nasa'i. (berarti hanya Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan dinilai shahih oleh: Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Hadits Rasulullah:

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata: bersabda Rasulullah saw. wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya (H.R. Ibnu Majah dan Daraquthni, dan para perawinya orang-orang terpercaya).

Semua Hadis di atas jelas menjelaskan posisi wali dalam pernikahan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan, dan oleh karenanya

²⁹Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 117.

³⁰*Ibid*, hlm. 119 – 120.

wali adalah bagian dari rukun pernikahan. Tidak adanya wali dalam pernikahan mengakibatkan tidak sahnya pernikahan.

2. Adapun ulama yang membolehkan seorang perempuan yang sudah dewasa (*al-aqilah-al-balighah*) boleh menikahkan dirinya sendiri adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan oleh karenanya nikah tanpa wali menjadi sah hukumnya.³¹ Adapun dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah:

Dasar al-Qur'an

Surat al-Baqarah ayat 232,

(232 :)

Artinya: Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya maka janganlah kamu (wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah mendapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. (QS. al-Baqarah: 232).³²

Mereka mendasarkan pada ayat di atas dengan memahami bahwa suatu pernikahan dipertalikan kepada kaum perempuan, sehingga tidak boleh orang lain untuk melarangnya. Pada pokoknya mereka mengaitkan pekerjaan kepada pelakunya dan bahwa dialah pelaku hakikinya yaitu orang yang paling berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya.³³

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230:

³¹Ridwan, *op. cit.*, hlm. 151.

³²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 56.

³³Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 17.

(230 :)

Artinya: Maka jika suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua) maka ia tidak halal baginya sesudah itu, sehingga perempuannya nikah dengan laki-laki lain (QS. al-Baqarah: 230).³⁴

Ayat ini dipahami bahwa pelaksanaan pernikahan disandarkan kepada seorang perempuan, dan ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh menikahkan dirinya tanpa perlu persetujuan walinya.³⁵

Al-Qur'an surat al-Baqarah 234:

(234 :)

Artinya: Kemudian jika habis masa iddahnya, maka tidak ada dosa untuk kamu sekalian (para wali) terhadap apa yang mereka (perempuan) lakukan dengan cara yang baik. (QS. al-Baqarah: 234).³⁶

Sekali lagi ayat di atas dimaknai bahwa perbuatan seseorang (termasuk menikah) adalah disandarkan langsung pada seorang perempuan, sehingga apa yang ia lakukan sebagai tindakan yang sah. Oleh karena itu kalau seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan seseorang yang *sekufu* (sederajat) dan dengan mahar yang pantas dan dilakukan dengan baik, maka tidak ada hak wali untuk menghalanginya.³⁷

Adapun ketentuan Hadits Rasulullah riwayat 'Aisyah Nabi bersabda "Siapa saja yang menikah tanpa wali maka nikahnya batal" oleh kalangan

³⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 55.

³⁵ Mahmud Ali as-Sarthawi, *loc.cit.*,

³⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 56

³⁷Ridwan, *op.cit.*, hlm. 151 – 152..

mazbab Hanafiyah dinilai tidak kuat (*dhaif*) berdasarkan penjelasan dari al-Zuhri bahwa dia tidak mengenal salah satu rawi Hadits ini yaitu Sulaiman ibn Musa.³⁸ Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa hadis-hadis yang menerangkan wali menjadi syarat dalam pernikahan, boleh jadi karena pihak wanita belum sempurna persyaratannya seperti karena masih kecil atau gila.³⁹

Di samping argumentasi normatif yuridis berupa al-Qur'an, imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf juga mendasarkan pada argumentasi rasional dengan perangkat metodologi deduksi analogis (*qiyas*) yaitu dengan meng*qiyaskan* akad nikah dengan akad-akad lainnya. Seorang perempuan yang dewasa adalah pribadi otonom yang mempunyai hak hukum untuk melakukan transaksi (akad) seperti transaksi jual-beli, oleh karenanya ia juga bebas untuk melakukan akad nikah atas nama dirinya sebagai subjek hukum. Dalam hal akad nikah, sekalipun walinya ada hak, namun tidak sepenuhnya. Wali sepenuhnya dapat menjalankan hak perwaliannya jika pihak perempuan ada kesalahan dalam menggunakan haknya seperti seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu*.⁴⁰

Dalam hubungannya dengan wali dalam pernikahan, salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan dalam bukunya menegaskan:

Keterangan-keterangan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang

³⁸ Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, *op.cit.*, hlm. 118

³⁹ Sayyid Sabiq, *loc.cit.*,

⁴⁰ Ridwan, *op.cit.*, hlm. 154 – 155.

wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.⁴¹

Perlu dijelaskan bahwa Ahmad Hassan dan para ulama yang disebut di atas tidak membolehkan menikah tanpa wali adalah dalam konteksnya wali untuk perempuan dan sama sekali tidak menyentuh orang *safih*. Dengan demikian *istinbat* yang digunakan Ibnu Qudamah adalah sangat tepat bahwa orang *safih* dalam hal pernikahan mempunyai wewenang yang sama dengan laki-laki pada umumnya yang tidak memerlukan wali.

Dalam perspektif Ibnu Qudamah bahwa ketidakharusan izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah adalah karena orang *safih* diqiyaskan dengan laki-laki pada umumnya yang tidak perlu wali. Selain itu pernikahan tidak menyangkut harta benda melainkan masalah kodrat biologis. Atas dasar itu pernikahan orang *safih* dianggap sah meskipun tidak ada izin dari wali. Dengan demikian *istinbat* yang dipakai Ibnu Qudamah adalah *qiyas*.

Menurut analisis penulis, pendapat Ibnu Qudamah yang meng-*qiyas*-kan pria *safih* dengan pria pada umumnya, ini kurang tepat karena orang *safih* itu tidak mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum demikian pula dalam hal pernikahan sebaiknya orang *safih* yang hendak menikah itu harus ada ijin dari wali karena jika ia menikah tanpa ijin dari wali maka sangat dimungkinkan karena kesafihannya itu disalahgunakan oleh wanita yang menjadi istrinya. Misalnya orang *safih* itu kebetulan orang kaya, sedangkan wanita yang menjadi istrinya miskin, kemudian wanita itu mau menikah

⁴¹ Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: Cet. 12, Jilid 1-2, CV Diponegoro, 2003, hlm. 244-263.

dengan safih lantaran kekayaan orang safih itu. Jika pernikahan seperti ini terjadi maka sangat mungkin wanita itu hanya cinta karena materi dan bila hal ini terjadi maka jika suatu saat orang safih itu hartanya habis sangat mungkin istrinya akan meninggalkan. Dengan kata lain akan terjadi dan menimpa orang safih sebuah semboyan "ada uang abang disayang tidak ada uang abang ditendang". Berdasarkan hal itu maka kurang tepat jika pria safih disamakan statusnya dengan pria pada umumnya yang tidak memerlukan ijin wali dalam pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diketengahkan sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Qudamah, akad nikah yang dilakukan orang *safih* (dungu) adalah sah, baik dia memperoleh izin dari walinya atau tidak, hal ini sebagaimana ia tegaskan bahwa hukumnya anak kecil dan orang gila sama seperti hukumnya orang *safih* (dungu/idiot), sang wali boleh memberi ijin kepadanya dalam sebagian perbuatan sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sah di antaranya ialah nikah, maka bilamana wali mengijinkan dia untuk menikah kemudian dia melaksanakan sendiri maka perbuatannya itu sah. Jikalau seorang *safih* menikah tanpa mendapat ijin dari walinya maka nikahnya itu sah, kemudian apabila *safih* ingin nikah nikah untuk jangka waktu tertentu yaitu yang lamanya bergantung pada permufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya maka dia boleh melakukannya meskipun tidak diijinkan walinya. Sama juga dia telah meminta kepada walinya yang kemudian ditolak maupun tidak ditolak. Namun nikahnya tidak sah kecuali dengan mahar misil
2. Dalam perspektif Ibnu Qudamah bahwa ketidakharusan izin dari wali bagi orang *safih* yang melakukan akad nikah adalah karena orang *safih* diqiyaskan dengan laki-laki pada umumnya yang tidak perlu wali. Selain

itu pernikahan tidak menyangkut harta benda melainkan masalah kodrat biologis. Atas dasar itu pernikahan orang *safih* dianggap sah meskipun tidak ada izin dari wali. Dengan demikian *istinbat* hukum yang dipakai Ibnu Qudamah adalah *qiyas*.

B. Saran-saran

Meskipun pendapat Ibnu Qudamah termasuk pendapat yang klasik, namun pemikiran dan pandangannya hendaknya dapat dijadikan masukan bagi pembentuk undang-undang pada saat ada kemungkinan merevisi Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, pemikiran Ibnu Qudamah dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Peneliti menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan peneliti. Semoga Allah SWT meridhainya. *Wallahu a'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.
- Annas, Imam Malik Ibn, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiyah tt.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1998.
- Ash Shiddieqy, TM.Hasbi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, jilid 8, 2001.
- , *Mutiara Hadits*, jilid 5, Semarang; PT.Pustaka Rizki Putra, 2003.
- , *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001.
- As-San'ani, Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhyat al-Turas al-Islami, 1960.
- Asy Syaukani, Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad, *Nail al -Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhbar*, Juz 4, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tth.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et. al*, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Ghazzi, Syekh Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, tth.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hassan, Ahmad, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: Cet. 12, Jilid 1-2, CV Diponegoro, 2003.

<http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Ibnu Qudamah.html>.

Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, terj. Ansori umara sitanggal, Semarang: CV Asyfa, 1996.

Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.

Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Khattab, M. Syarafuddin, *et all, Tahqiq al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.

M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Malibary, Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-'Uyun*, Semarang: Maktabah wa Matbaah, karya Toha Putera, tth.

Marwazi, Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani, hadits No. 1670 dalam CD program *Mausu'ah Hadits al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001.

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Mursi, Muhammad Sa'id, *'Udhama' al-Islam 'Ibra Arba'at, 'Asara Qurunan Min al-Zaman*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Achmad Faozan, "Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Qazwini, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah, hadits No. 1750 dalam CD program *Mausu'ah Hadits al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, (Global Islamic Software Company).
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughny*, Juz 11, Kairo: Daar al-Manar, 1367.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977.
- Rosalin, *Analisis Pendapat Ahmad Hassan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*, (Skripsi, Untuk meraih Sarjana Hukum Islam: tidak dipublikasikan), Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005.
- Rusyd, Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid Wa nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jil, juz 2, 1409H/1989M.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah VII*, Terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977.
- Sosroatmodjo, Arso, dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989.

Syalthut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Syaukani, Imam, *Nail al-Autar*, Juz 4, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tt.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986.

Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002.

Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1978.

Yunus, Mahmud, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mukholil

Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 08 Agustus 1983

Alamat Asal : Desa Podosari RT 06/02 Cepiring Kendal

Pendidikan : - SD Podosari Kendal lulus th 1996

- MTs NU 01 Kendal lulus th 1999

- MAN Futuhiyah Demak lulus th 2002

- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Angkatan 2003

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ahmad Mukholil

BIODATA DIRI DAN ORANG TUA

Nama : Ahmad Mukholil
NIM : 032111171
Alamat : Desa Podosari RT 06/02 Cepiring Kendal.
Nama orang tua : Bapak Wardan dan Ibu Salimah
Alamat : Desa Podosari RT 06/02 Cepiring Kendal.